

PROPORSI KEMISKINAN DI KABUPATEN BOGOR

THE PROPORTION OF POVERTY IN BOGOR DISTRICT

Titin Suhartini

Departemen Statistika, Institut Pertanian Bogor
Jln. Meranti Wing 22 Level 4 Kampus IPB Dramaga Bogor 16680
E-mail: t2n_one@yahoo.com

Kusman Sadik

Departemen Statistika, Institut Pertanian Bogor
Jln. Meranti Wing 22 Level 4 Kampus IPB Dramaga Bogor 16680
E-mail: kusmansadik@gmail.com

Indahwati

Departemen Statistika, Institut Pertanian Bogor
Jln. Meranti Wing 22 Level 4 Kampus IPB Dramaga Bogor 16680
E-mail: indahwati_43@yahoo.co.id

Accepted: 1 July 2015; Revised: 1 August 2015; Approved: 10 August 2015

Abstract

Poverty is one of the fundamental problems that becomes the focus of the Indonesian government. One of the important aspects to support the poverty reduction strategy is the availability of accurate data and information. This research is aimed to estimate the proportion of households' poverty status at the Subdistrict level in Bogor District and to identify the occupation resource/type of households'. The method which has been conducted was based on direct estimation by the assumption of simple random sampling method to obtain the proportion's estimator and based on crosstabulation to identify the occupation resource/type background impacting to the poverty. This research used secondary data of National Socioeconomic Survey (Susenas) with selected variables. Central Bureau of Statistics (BPS) of Indonesia had a program to collect data by census and survey. The survey used the complex sampling design method. The results of this research show that the poor households in Bogor District consist of 6.84%. 31.08% of the poor households come from the type of occupation from food crops' agriculture. The proportion estimation of household poverty status can be done in 24 subdistricts only. The biggest proportion estimation of the poor households is in Nanggung subdistrict, namely: 45%. To handle the limitations of estimation in the other 16 subdistricts can use an alternative method of Small Area Estimation.

Keywords: *estimation, proportion, households.*

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah Indonesia. Aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah ketersediaan data dan informasi yang akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menduga proporsi status kemiskinan rumah tangga pada tingkat kecamatan di Kabupaten Bogor dan mengidentifikasi sumber/jenis pekerjaan rumah tangga. Metode yang disusun berdasarkan pendugaan langsung dengan asumsi metode sampel acak sederhana untuk memperoleh penduga proporsi dan berdasarkan tabulasi silang untuk mengetahui latar belakang jenis pekerjaan yang berdampak pada kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan variabel terpilih. Badan Pusat Statistik memiliki program pengumpulan data melalui sensus dan survei. Survei tersebut menggunakan metode rancangan penarikan sampel yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga miskin di Kabupaten

Bogor sebesar 6,84%. 31,08% rumah tangga miskin berasal dari jenis pekerjaan pertanian tanaman pangan. Hanya 24 kecamatan yang dapat dilakukan pendugaan proporsi status kemiskinan rumah tangga. Pendugaan proporsi rumah tangga miskin terbesar berada di kecamatan Nanggung yaitu sebesar 45%. Untuk mengatasi keterbatasan pendugaan yang dilakukan terhadap 16 kecamatan lainnya dapat menggunakan alternatif metode pendugaan area kecil.

Kata Kunci: *pendugaan, proporsi, rumah tangga.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang bersifat multidimensional. Dewasa ini, kemiskinan telah menjadi pusat perhatian pemerintah Indonesia ditandai dengan pembentukan Tim Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Fokus utama pemerintah yaitu menggerakkan program-program penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi angka kemiskinan.

Definisi umum kemiskinan menurut Bappeda dan BPS Kab. Bogor (2014) adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain: 1) terpenuhinya kebutuhan pangan, 2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, 3) rasa aman dari tindak kekerasan dan hak berpartisipasi dalam sosial politik.

Bappeda dan BPS Kab. Bogor (2014) menjelaskan bahwa ciri-ciri penduduk/rumah tangga miskin diantaranya adalah keterbatasan penghasilan, keterbatasan pemilikan, keterbatasan tempat tinggal, keterbatasan keterampilan, keterbatasan pendidikan, tingkat kesehatan yang rendah, kehidupan normatif yang kurang dihargai, keterbatasan lingkungan sosial, dan keterbatasan dalam melaksanakan hubungan sosial dengan masyarakat disekitarnya.

Berbagai macam pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengukur kemiskinan.

Pendekatan umum yang digunakan yaitu pendekatan moneter dan non moneter. Konsep kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah pendekatan moneter. BPS menerapkan kemiskinan yang diukur dengan menggunakan konsep pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Definisi kemiskinan penduduk Indonesia terkait dengan pendekatan pengeluaran adalah konsumsi. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Pengeluaran perkapita perbulan menunjukkan besarnya pengeluaran setiap anggota rumah tangga dalam kurun waktu satu bulan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non-makanan (Bappeda dan BPS Kab. Bogor, 2014).

Menurut Bappeda dan BPS Kab. Bogor (2014), pengukuran GK yaitu penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori perkapita. Sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.

Menurut Bappeda dan BPS Kab. Bogor (2014), kemiskinan dan penanggulangannya telah menjadi prioritas pembangunan dan menjadi agenda pokok yang mengerahkan berbagai sumber daya pembangunan. Pada tingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah (Pemda) menargetkan penurunan jumlah penduduk miskin. Penurunan jumlah penduduk miskin menjadi prioritas di beberapa Pemda untuk menekan laju angka kemiskinan yang terus bergerak seiring laju pertumbuhan penduduk. Upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Menurut TNP2K, berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah maupun Pemda yaitu mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil.

Adapun program yang telah dilakukan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Jaminan Kesehatan masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beras untuk keluarga miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM mandiri) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hal yang menarik dikemukakan oleh Suradi (2015) mengenai intervensi sosial dalam penanggulangan kemiskinan tidak luput dari isu ketidakadilan. Ketika pemerintah menggulirkan program perlindungan sosial bagi keluarga miskin, kenyataan menunjukkan bahwa penerima bantuan sosial bukan dari Keluarga Sangat Miskin (KSM). Sumber ketidakadilan dalam intervensi sosial tersebut,

salah satunya adalah permasalahan data yang tidak valid. Sebagus apa pun program, apabila sasaran penerima manfaatnya tidak tepat, maka implementasi program dapat dipastikan tidak akan efektif dan efisien.

Adanya penegasan isu program tidak tepat sasaran akibat ketidakvalidan data yang dikemukakan Suradi (2015) menekankan bahwa pentingnya validitas data. Dukungan data yang akurat ini dikemukakan pula oleh Suyanto dan Pudjianto (2014). Oleh karena itu, salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan tersebut adalah tersedianya data dan informasi yang akurat. Ketepatan data sangat diperlukan agar program yang dilaksanakan pemerintah dapat terealisasi pada sasaran yang tepat. Ketersediaan data dan informasi ini sangat diperlukan untuk menentukan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan wilayah serta memastikan keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian sasaran program penanggulangan kemiskinan pada tingkat nasional maupun daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).

Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki program pengumpulan data melalui sensus dan survei. Survei tersebut menggunakan metode rancangan penarikan sampel yang demikian kompleks. Data kemiskinan berdasarkan hasil survei nasional telah dipublikasi oleh BPS setiap bulan Maret dan September setiap tahunnya berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Permasalahannya adalah sasaran survei masih dalam lingkup nasional berdasarkan Susenas.

Susenas hanya mampu menghasilkan pendugaan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sedangkan kebutuhan data sampai tingkat yang lebih kecil seperti tingkat kecamatan belum dapat dilakukan dikarenakan ketidakcukupan ukuran sampel. Ketika data

survei lingkup nasional ingin diperoleh informasi untuk area yang lebih kecil akan mengakibatkan presisi yang tidak memadai (Kurnia, 2009). Statistik yang diperoleh dari survei nasional memiliki tingkat akurasi yang memadai, namun tidak bagi area kecil yang memiliki tingkat akurasi yang mungkin lebih rendah. Untuk menambah ukuran sampel sampai tingkat terkecil dibutuhkan biaya yang sangat besar dan membutuhkan waktu yang relatif lama.

Molina dan Rao (2013) menyebutkan bahwa survei nasional tidak dirancang untuk memberikan gambaran kehandalan statistik di tingkat lokal. Kurnia (2009) menjelaskan mengenai area kecil yang didefinisikan sebagai himpunan bagian dari populasi dengan suatu variabel yang menjadi perhatian. Domain/area dianggap kecil jika sampel khusus domain sangat kecil dan bahkan dapat nol disebut subdomain/area lokal/subgrup kecil/domain kecil.

Penelitian ini berupaya menerapkan pendugaan parameter proporsi menggunakan metode yang sederhana hingga level kecil yaitu pada tingkat area kecamatan. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi salah satu faktor yang mendasari/melatarbelakangi kemiskinan yaitu sumber/jenis pekerjaan suatu rumah tangga. Data yang digunakan berupa data sekunder Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan variabel terpilih yang bersumber dari BPS.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, kiranya perlu untuk melakukan kajian mengenai bagaimana pendugaan proporsi kemiskinan sampai dengan tingkat kecamatan dan mengidentifikasi jenis pekerjaan yang melatarbelakangi status kemiskinan suatu rumah tangga. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk melakukan pendugaan kemiskinan

berupa proporsi status kemiskinan rumah tangga tingkat kecamatan di Kabupaten Bogor dan salah satu faktor yang melatarbelakangi kemiskinan yang akan dibahas pada penelitian ini berupa jenis pekerjaan rumah tangga miskin di Kabupaten Bogor. Perumusan permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut:

Jenis pekerjaan apakah yang melatarbelakangi rumah tangga miskin di Kabupaten Bogor?

Bagaimana pendugaan proporsi status kemiskinan rumah tangga tingkat kecamatan di Kabupaten Bogor dan berapakah proporsi yang diperoleh dari proses pendugaan tersebut?

Adanya ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai proporsi status kemiskinan rumah tangga pada tingkat kecamatan di Kabupaten Bogor ini, diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah ataupun Pemda serta stakeholder untuk memanfaatkan data dan informasi tersebut dalam upaya penanggulangan kemiskinan hingga tingkat administrasi yang lebih kecil yaitu kecamatan.

PEMBAHASAN

Metode

Unsur/elemen dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang menjadi sampel Susenas pada tahun 2013. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bogor. Pemilihan Kabupaten Bogor berdasarkan pada GK Kabupaten Bogor yang masih berada di bawah GK Provinsi Jawa Barat dan bahkan GK Indonesia pada tahun 2013. Kabupaten Bogor menjadi salah satu Kabupaten yang seharusnya menjadi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh rumah tangga di Kabupaten Bogor tahun 2013, sedangkan sampelnya adalah rumah tangga

yang terpilih menjadi responden pada Susenas tahun 2013. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data kuantitatif. Row data Susenas dengan variabel terpilih diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Metode yang digunakan adalah pendugaan secara langsung terhadap proporsi status kemiskinan yang diasumsikan menggunakan metode penarikan sampel acak sederhana (*simple random sampling*). Sedangkan untuk metode dalam mengidentifikasi jenis pekerjaan menggunakan crosstabulation. Perangkat pengolah data menggunakan SPSS versi 16.0 dan Microsoft Excel 2010.

Menurut Scheaffer, et al. (2006), pendugaan proporsi dan variasi proporsi yang diasumsikan menggunakan simple random sampling yaitu sebagai berikut:

$$\hat{p}_i = \bar{y}_i = \frac{\sum_{i=1}^{n_i} y_i}{n_i}, \hat{V}(\hat{p}_i) = \frac{\hat{p}_i(1-\hat{p}_i)}{n_i-1} \left(\frac{N_i-n_i}{N_i} \right)$$

dengan

- p_i = pendugaan proporsi area ke-i
- y_i = jumlah kejadian elemen/unit/rumah tangga miskin yang disampel pada area ke-i
- n_i = jumlah total elemen/unit/rumah tangga yang disampel pada area ke-i
- N_i = jumlah total elemen/unit/rumah tangga populasi pada area ke-i
- i = indeks (1,..., m)
- m = area/kecamatan

Untuk mengetahui kebaikan penduga proporsi yang dihasilkan dapat menggunakan nilai Relative Root= Mean Square Error (RRMSE), yaitu:

$$MSE(\hat{p}_i) = 2\sqrt{\hat{V}(\hat{p}_i)} \cdot RRMSE(\hat{p}_i) = \frac{\sqrt{MSE(\hat{p}_i)}}{\hat{p}_i}$$

Tabel crosstabulation atau dikenal dengan tabel tabulasi silang atau tabel kotingensi

menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel dengan tipe kategori baik nominal ataupun ordinal (SPSS versi 16.0). Pada penelitian ini, tabel tabulasi silang menggunakan dua variabel yaitu status kemiskinan suatu rumah tangga dan jenis pekerjaan yang melatarbelakangi kemiskinan pada rumah tangga tersebut. Ilustrasi dari tabel tabulasi silang seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Bentuk Umum Tabel Tabulasi Silang

No	Jenis Pekerjaan	Status Kemiskinan		Total
		Tidak Miskin	Miskin	
1	X	a	b	a+b
2	Y	c	d	c+d
Jumlah		a+c	b+d	n = a+b+c+d

Sumber: Tutorial SPSS versi 16.0

Profil Kabupaten Bogor

BPS Kab. Bogor (2014) menjelaskan bahwa wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas 2.301,95 km², berarti Kabupaten Bogor luasnya sekitar 5,19% dari luas Wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara geografis terletak antara 6,190 LU – 6,470 LS dan 1060 1’ – 107 0 103’ Bujur Timur dengan tipe morfologi wilayah bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, yaitu sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15-100 meter di atas permukaan laut (dpl), 42,62% berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, 19,53% berada pada ketinggian 500-1000 meter dpl, 8,43% berada pada ketinggian 1.000-2.000 meter dpl dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000-2.500 meter dpl.

Kabupaten Bogor memiliki batas strategis antara lain: sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak, sebelah barat daya berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, sebelah utara berbatasan dengan Kota Depok,

sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, sebelah timur laut berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, sebelah tenggara berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan sebelah tengah dengan Kota Bogor.

Menurut Pemkab. Bogor (t.thn), pertanian di Kabupaten Bogor terdiri dari pertanian tanaman pangan, sayuran dan hortikultura serta perkebunan. Tanaman pangan padi menyebar hampir di semua kecamatan, dengan variasi luasan yang berbeda. Umumnya padi sawah menyebar di wilayah tengah dan utara, dimana sudah tersedia irigasi, seperti di kecamatan Rumpin, Cigudeg, Sukajaya, Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea, Caringin, Jonggol, Sukamakmur dan Cariu. Daerah pertanian hortikultura seperti sayuran dan buah juga menyebar pada hampir semua wilayah, tetapi konsentrasi komoditas tertentu hanya menyebar pada wilayah tertentu. Komoditas tanaman pangan diantaranya tanaman jagung menyebar di kecamatan Dramaga, Cisarua, Megamendung, Cileungsi, Klapanunggal, Rancabungur, Cibinong, Ciseeng, Gunung Sindur dan Rumpin. Sedangkan tanaman kedelai menyebar hanya di kecamatan Tamansari, Kemang, Rancabungur dan Megamendung. Situasi yang sama juga terjadi pada sayuran dan buah. Dominasi daerah sayuran berada di beberapa kecamatan seperti Cisarua, Dramaga, Leuwisadeng, Cigombong, sedangkan buah berasal dari kecamatan Tanjungsari, Mekarsari, Jasinga, Tajurhalang dan lain-lain.

Wilayah penghasil tanaman hias menyebar di beberapa kecamatan yaitu: Tamansari, Cijeruk, Ciawi, Megamendung, Tajurhalang, Gunung Sindur, Bojonggede dan lain-lain. Lain halnya untuk tanaman perkebunan masih relatif terbatas di Kabupaten Bogor. Dengan beragamnya jenis tanaman di wilayah ini, namun yang dominan di Kabupaten Bogor adalah penghasil utama pertanian yaitu komoditas subsektor tanaman pangan (Pemkab Bogor, t.thn).

Data Susenas Tahun 2013

Kabupaten Bogor merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 40 (empat puluh) wilayah kecamatan. Jumlah rumah tangga populasi di Kabupaten Bogor seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga Setiap Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga
1	Nanggung	22376
2	Leuwiliang	29509
3	Leuwisadeng	18192
4	Pamijahan	34444
5	Cibungbulang	32722
6	Ciampea	38194
7	Tenjolaya	14664
8	Dramaga	27659
9	Ciomas	40054
10	Tamansari	25664
11	Cijeruk	19794
12	Cigombong	22257
13	Caringin	28535
14	Ciawi	26868
15	Cisarua	29148
16	Megamendung	24337
17	Sukaraja	46473
18	Babakan Madang	26848
19	Sukamakmur	20771
20	Cariu	15662
21	Tanjungsari	15987
22	Jonggol	35974
23	Cileungsi	72627
24	Kelapa Nunggal	27843
25	Gunungputri	95559
26	Citeureup	57190
27	Cibinong	93529
28	Bojonggede	61542
29	Tajurhalang	26459
30	Kemang	24525
31	Rancabungur	12734
32	Parung	28165
33	Ciseeng	24641
34	Gunungsindur	26720
35	Rumpin	30776

36	Cigudeg	27248
37	Sukajaya	13985
No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga
38	Jasinga	21584
39	Tenjo	15756
40	Parungpanjang	26901

Sumber: BPS Kabupaten Bogor Dalam Angka, Tahun 2014

Berdasarkan jumlah rumah tangga pada setiap kecamatan, maka diperoleh jumlah rumah tangga di Kabupaten Bogor yaitu sebesar 1.283.916. Jumlah rumah tangga terbanyak berada di kecamatan Gunungputri sebesar 95.559 rumah tangga dan jumlah rumah tangga paling sedikit yaitu kecamatan Rancabungur 12.734 rumah tangga.

Identifikasi Jenis Pekerjaan

BPS (t.thn) menjelaskan bahwa rumah tangga adalah sekelompok orang yang biasanya tinggal bersama dalam suatu bangunan serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Salah satu ciri-ciri penduduk/rumah tangga miskin seperti yang telah dijelaskan di pendahuluan bahwa salah satunya adalah keterbatasan dalam hal penghasilan. Pada penelitian ini diasumsikan penghasilan sama dengan pendapatan. Penghasilan merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur kemiskinan yang termasuk kedalam pendekatan moneter. Salah satu sumber penghasilan berasal dari jenis mata pencaharian/pekerjaan.

Kategori miskin bagi rumah tangga pada tingkat kecamatan di Kabupaten Bogor tidak hanya diukur menggunakan pendekatan pengeluaran konsumsi tetapi perlu juga memperhatikan jenis pekerjaan yang dominan pada rumah tangga miskin. Jenis pekerjaan tersebut akan diidentifikasi pada penelitian ini.

Umumnya penelitian mengenai pendugaan area kecil menggunakan data jumlah petani pada suatu area tertentu sebagai variabel tambahan. Beberapa literatur menyebutkan kemiskinan identik dengan petani. Adetayo (2014) telah melakukan riset mengenai kemiskinan pada rumah tangga pertanian. Pada penelitian ini, hasil pengolahan data belum menangani masalah missing value/data hilang yang terjadi pada data Susenas. Berdasarkan data yang diperoleh ditemui data hilang variabel jenis pekerjaan terdapat 52 rumah tangga dari 1126. Persentase data hilang jenis pekerjaan tersebut kurang dari 5%. Sedangkan untuk rumah tangga miskin yang bersesuaian dengan data hilang jenis pekerjaan ditemukan pada 3 (tiga) observasi yaitu nomor 498, 501 dan 1.032. Persentase rumah tangga miskin yang bersesuaian dengan data hilang jenis pekerjaan tersebut kurang dari 4%. Data hilang tersebut mengindikasikan dua kemungkinan bahwa rumah tangga tersebut tidak mempunyai pekerjaan atau *null* karena tidak diperoleh jawaban pada saat proses pengumpulan data (item missing/tidak ada jawaban pada item pertanyaan).

Pada proses pengolahan data tidak mengikutsertakan data hilang ke-3 observasi tersebut, diasumsikan berdasarkan jumlah data yang tersedia sebanyak 74 (tujuh puluh empat) dari total rumah tangga miskin 77 (tujuh puluh tujuh). Dengan menggunakan *crosstabulation* antara jenis pekerjaan dan status kemiskinan, diperoleh hasil bahwa sejumlah 31,08% rumah tangga miskin di Kabupaten Bogor berasal dari jenis pekerjaan pertanian tanaman pangan seperti terlihat pada tabel 3.

Urutan terbesar kedua setelah pertanian tanaman pangan, yaitu jenis pekerjaan jasa kemasyarakatan pemerintahan dan perorangan berkontribusi sebesar 21,62%. Selanjutnya yaitu jenis pekerjaan di bidang perdagangan sebesar 14,86%.

Jika dicermati lebih detail bahwa jenis pekerjaan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan dan pertanian lainnya termasuk kedalam definisi usaha pertanian (BPS, 2014). Oleh karena itu, jenis pekerjaan ke-6 (enam) sub sektor tersebut berkontribusi terhadap

rumah tangga miskin di Kabupaten Bogor sebesar 42,85% sejalan dengan KPPN (2014) menyatakan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin di Indonesia adalah rumah tangga pertanian yaitu sebesar 48,8%. Sumber data yang digunakan oleh KPPN adalah hasil sensus pertanian tahun 2013.

Tabel 3. Identifikasi Jenis Pekerjaan dengan Rumah Tangga Miskin di Kab. Bogor Tahun 2013

No	Jenis Pekerjaan	Status Kemiskinan		Total
		Tidak Miskin	Miskin	
1	Pertanian tanaman pangan	116	23	139
2	Hortikultura	21	3	24
3	Perkebunan	7	3	10
4	Perikanan	10	1	11
5	Peternakan	18	2	20
6	Kehutanan dan pertanian lainnya	6	1	7
7	Pertambangan dan penggalian	34	2	36
8	Industri pengolahan	186	3	189
9	Listrik dan gas	9	0	9
10	Konstruksi dan bangunan	103	5	108
11	Perdagangan	182	11	193
12	Hotel dan rumah makan	21	1	22
13	Transportasi dan pergudangan	76	2	78
14	Informasi dan komunikasi	2	0	2
15	Keuangan dan asuransi	14	0	14
16	Jasa pendidikan	24	0	24
17	Jasa kesehatan	6	0	6
18	Jasa kemasyarakatan pemerintahan dan perorangan	153	16	169
19	Lainnya	12	1	13
Jumlah		1000	74	1074

Sumber: Hasil pengolahan data Susenas, tahun 2015

Menurut Nurdyana, dkk (2012), sektor usaha kepala rumah tangga yang bekerja pada sektor pertanian memberikan kontribusi positif terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku Utara. Hal serupa dikemukakan oleh Rakhmawati (2014) yaitu salah satu faktor penentu kemiskinan di Indonesia adalah persentase tenaga kerja di sektor pertanian. Kemiskinan di pedesaan di Indonesia dapat berkurang dengan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, sehingga terjadi peningkatan produktivitas per-hektar atau pada rumah

tangga. Hal yang disarankan adalah program pengentasan kemiskinan di sektor pertanian, seperti perbaikan lahan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pembangunan masyarakat pedesaan perlu diprioritaskan agar masyarakat Indonesia dapat keluar dari permasalahan kemiskinan.

Menurut Putri dan Setiawina, buruh tani seharusnya mencoba mencari pekerjaan tambahan untuk meningkatkan pendapatan agar dapat memperoleh penghidupan yang

lebih layak sehingga dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Namun, penelitian di Kota Bengkulu mengemukakan hal berbeda, Arianti, dkk menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan kemiskinan dengan persentase tenaga kerja di sektor pertanian. Beragamnya jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kemiskinan tergantung pada lokasi penelitian dan responden yang mewakili populasi pada penelitian yang bersangkutan.

Pendugaan Proporsi Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan di dunia telah banyak dibahas di berbagai negara di belahan dunia. Purnomo (2010) memaparkan bahwa World Bank mengukur garis kemiskinan berdasarkan pendapatan perkapita perhari kurang dari US\$1 (*Purchasing Power Parity*). Sedangkan Pemerintah Indonesia berpedoman pada pengukuran yang dilakukan oleh BPS dengan perhitungan *Head Count Index* (P0) yang menyatakan jumlah penduduk miskin yang berada di bawah GK. Peneliti lainnya memiliki pengukuran yang beragam, sehingga untuk melakukan perbandingan diantaranya tidak mungkin dilakukan karena memiliki pendekatan yang berbeda-beda.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional sehingga permasalahan yang dihadapi adalah sulitnya mengukur kemiskinan tersebut, sehingga diperlukan adanya pendekatan-pendekatan. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah variabel pengeluaran konsumsi perkapita perbulan yang diasumsikan lebih baik daripada pengukuran menggunakan pendapatan. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa pengeluaran konsumsi lebih terukur dan lebih merefleksikan kondisi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Pada penelitian ini pengukuran dilakukan berdasarkan status kemiskinan rumah tangga

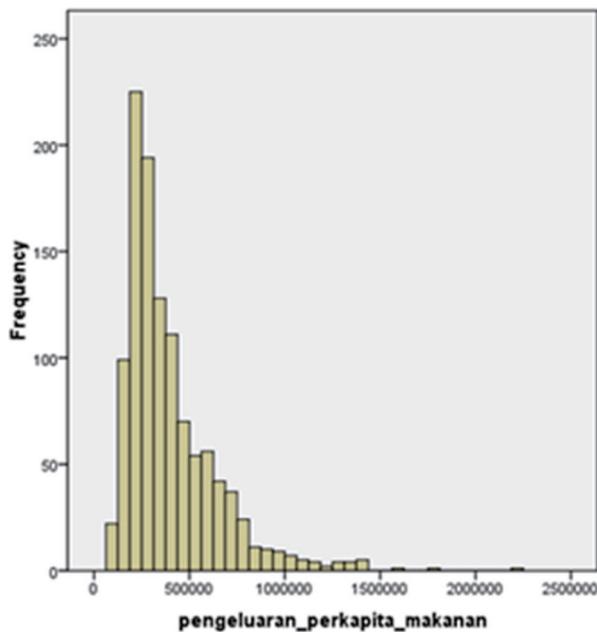
yang terdiri atas dua kategori yaitu miskin dan tidak miskin. Rumah tangga miskin diperoleh dari rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (GK). Pengukuran ini dilakukan pula oleh BPS (2014) dan Nurdyana, dkk (2012). Pengeluaran perkapita merupakan pembagian pengeluaran total perbulan rumah tangga dengan banyaknya jumlah anggota rumah tangga tersebut.

Pendugaan area kecil dapat diduga dengan dua pendekatan yaitu pendekatan klasik didasarkan pada aplikasi model desain penarikan sampel yang menghasilkan metode pendugaan langsung (*design based*) atau metode pendugaan tidak langsung (*model based*).

Nilai proporsi rumah tangga miskin dihitung berdasarkan kategori miskin berdasarkan dimensi moneter berupa pengeluaran perkapita perbulan rumah tangga tersebut yang berada dibawah GK Kabupaten Bogor dengan rumah tangga pada area tersebut. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan September 2012 yang dipublikasi oleh Bappeda dan BPS Kab. Bogor (2014) yaitu Garis kemiskinan (GK) Kabupaten Bogor sebesar Rp 271.970,- berada dibawah GK Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 276.825,- bahkan GK Nasional yaitu Rp. 292.951,-. GK Kabupaten Bogor ini yang menjadi acuan dalam pengkategorian rumah tangga termasuk kedalam kategori miskin atau tidak. Rumah tangga pada setiap kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki pengeluaran konsumsi perkapita perbulan dibawah GK Kabupaten Bogor (Rp. 271.970,-), maka rumah tangga tersebut dikategorikan miskin, selainnya tidak miskin. Objek survei adalah rumah tangga di Kabupaten Bogor dengan respon biner (miskin dan tidak miskin).

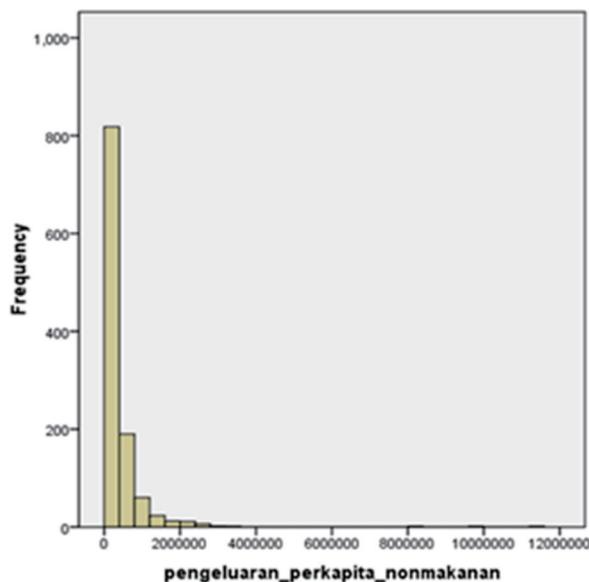
Pengeluaran konsumsi perkapita perbulan merupakan penjumlahan pengeluaran perkapita perbulan makanan dan pengeluaran perkapita

perbulan non makanan. Sebaran pengeluaran perkapita perbulan makanan dan non makanan seperti pada gambar 1 dan 2.



Gambar 1. Sebaran Pengeluaran Perkapita Makanan Perbulan Rumah Tangga di Kab. Bogor Tahun 2013

Sumber: Hasil pengolahan data Susenas, tahun 2015



Gambar 2. Sebaran Pengeluaran Perkapita Non Makanan Perbulan Rumah Tangga di Kab. Bogor Tahun 2013

Sumber: Hasil pengolahan data Susenas, tahun 2015

Hasil pengolahan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran perkapita perbulan makanan adalah Rp. 397.032,- dan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan non makanan adalah Rp. 402.846,-. Perbedaan kedua rata-rata tersebut relatif kecil sekitar Rp. 5.814,-. Kemiskinan identik dengan pengeluaran perkapita konsumsi makanan yang relatif besar dibandingkan dengan nilai pengeluaran perkapita konsumsi non makanan. Untuk kasus rumah tangga di Kabupaten Bogor ini relatif hampir sama jika dilihat dari statistik rata-rata.

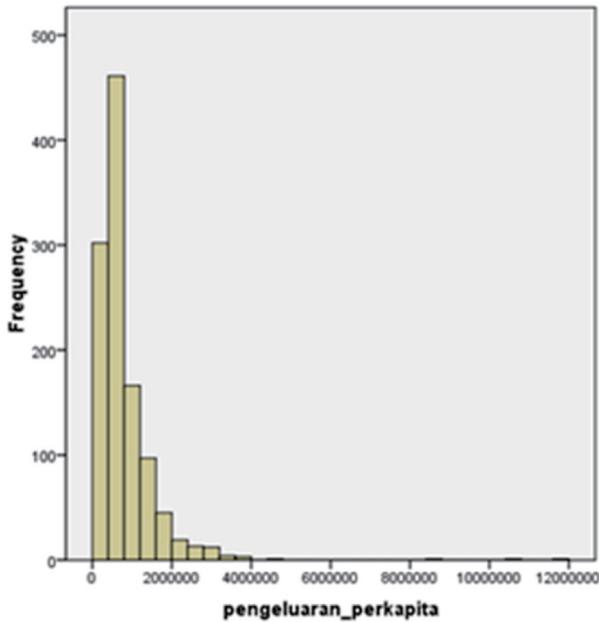
Berdasarkan sebaran yang dihasilkan pada gambar 1 dan 2 bahwa rentang/selang antara satu rumah tangga dengan rumah tangga lainnya pada sebaran pengeluaran perkapita perbulan makanan relatif lebih sempit yaitu $Rp. 93.191 < x_i < Rp. 2.194.285$, dengan $x_i =$ pengeluaran perkapita perbulan makanan pada rumah tangga ke- i , $i=1, \dots, 1126$. Lain halnya dengan selang sebaran pengeluaran perkapita perbulan non makanan relatif lebih lebar yaitu $Rp. 49.166 < y_i < Rp. 11.492.856$, dengan $y_i =$ pengeluaran perkapita perbulan non makanan pada rumah tangga ke- i .

Berdasarkan penjumlahan kedua pengeluaran tersebut diperoleh gambaran pengeluaran perkapita perbulan rumah tangga di Kabupaten Bogor tahun 2013 seperti pada tabel 4.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Pengeluaran Perkapita Perbulan di Kab. Bogor Tahun 2013

N	Min	Maks	Rata-rata	Standar Deviasi
1126	156452	1.E7	8.00E5	771.281.181

Sumber: Hasil pengolahan data Susenas, tahun 2015



Gambar 3. Sebaran Pengeluaran Perkapita Perbulan Rumah Tangga di Kab. Bogor Tahun 2013

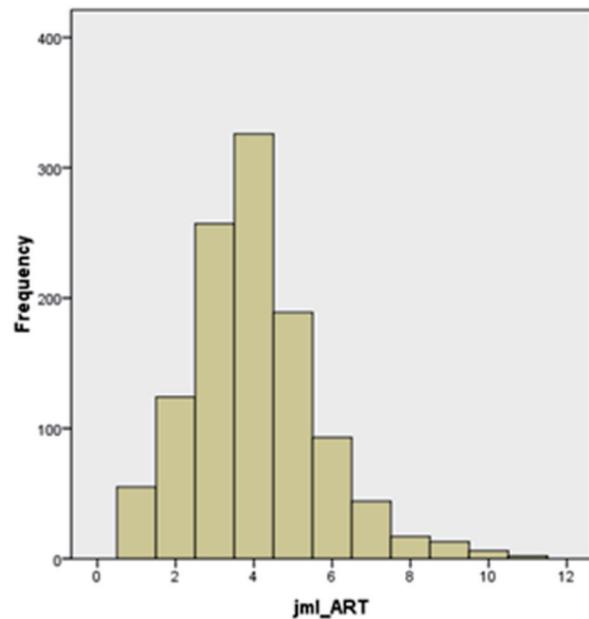
Sumber: Hasil pengolahan data Susenas, tahun 2015

Berdasarkan statistik deskriptif pengeluaran perkapita perbulan rumah tangga di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa dari 1.126 rumah tangga diperoleh pengeluaran perkapita minimum sebesar Rp. 156.452,- dan pengeluaran perkapita maksimum sebesar Rp. 11.935.499,-. Jika dilihat dari sebarannya seperti pada gambar 3.

Sebaran pengeluaran perkapita perbulan rumah tangga di Kabupaten Bogor menunjukkan kemonjulan ke kanan yang mengindikasikan sebaran tidak normal. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Kurnia (2009) yang menyatakan bahwa sebaran pengeluaran perkapita perbulan rumah tangga umumnya selalu menunjukkan kemonjulan ke kanan. Ini mempertegas bahwa pengeluaran perkapita perbulan dengan nilai kecil menyebar di banyak rumah tangga di Kabupaten Bogor. Sedangkan pengeluaran perkapita perbulan yang memiliki nilai besar hanya sedikit menyebar di rumah tangga di

Kabupaten Bogor yang ditunjukkan dengan frekuensi yang relatif semakin mengecil.

Pengeluaran perkapita perbulan rumah tangga berasal dari pembagian antara pengeluaran total dengan jumlah anggota rumah tangga (ART), dengan bertambahnya jumlah ART maka akan mengurangi jumlah pengeluaran perkapita perbulan rumah tangga tersebut. Sebaran dari jumlah ART di Kab. Bogor seperti pada gambar 4.



Gambar 4. Sebaran Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) di Kab. Bogor Tahun 2013

Sumber: Hasil pengolahan data Susenas, tahun 2015

Berdasarkan gambar 4 diperoleh hasil bahwa rata-rata jumlah ART di Kab. Bogor adalah empat jiwa. Sebaran jumlah ART menunjukkan sebaran mendekati normal, namun perlu dilakukan uji formal kenormalan untuk memastikan asumsi sebaran normal.

Dari frekuensi rata-rata jumlah ART pada tabel 5 menunjukkan 29% dari total rumah tangga yang menjadi sampel memiliki jumlah ART sebanyak 4 (empat) jiwa. Makin banyaknya

jumlah ART maka akan mengurangi pengeluaran perkapita perbulan rumah tangga. Berdasarkan jumlah rumah tangga yang terkategori miskin, diperoleh dugaan bahwa jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Bogor sebesar 6,84%. Hasil pendugaan proporsi rumah tangga miskin serupa seperti yang dikemukakan oleh Ruslan (2013) menyatakan bahwa sebagian besar penduduk miskin terkonsentrasi di Pulau Jawa sebesar 57%, salah satu didalamnya adalah Kabupaten Bogor. Namun, jumlah rumah tangga miskin akan terus berfluktuasi seiring dengan kenaikan laju penduduk, sehingga perlu diperhatikan pendugaan proporsi rumah tangga miskin di Kabupaten Bogor.

Tabel 5. Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) di Kab. Bogor Tahun 2013

Jumlah ART	Frekuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase Kumulatif
1	55	4.9	4.9	4.9
2	124	11.0	11.0	15.9
3	257	22.8	22.8	38.7
4	326	29.0	29.0	67.7
5	189	16.8	16.8	84.5
6	93	8.3	8.3	92.7
7	44	3.9	3.9	96.6
8	17	1.5	1.5	98.1
9	13	1.2	1.2	99.3
10	6	0.5	0.5	99.8
11	2	0.2	0.2	100.0
Jumlah	1126	100.0	100.0	

Sumber: Hasil pengolahan data Susenas, Tahun 2015

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2013, diperoleh bahwa jumlah rumah tangga yang menjadi sampel yaitu 1.126 rumah tangga yang terdiri atas 37 (tiga puluh tujuh) kecamatan dan tiga kecamatan lainnya tidak menjadi sampel Susenas yaitu kecamatan Megamendung, Tanjungsari, Parungpanjang. Maka dari itu, untuk ke-3 kecamatan tersebut tidak dapat dilakukan pendugaan langsung karena

memerlukan informasi mengenai jumlah rumah tangga yang menjadi sampel. Selain itu keterbatasan ketersediaan data yang dimiliki peneliti mengenai jumlah *cluster* dan jumlah rumah tangga pada setiap cluster sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengayaan alternatif metode dan perbandingan mana yang terbaik dari berbagai *metode sampling* lainnya belum dapat diterapkan seperti *stratified random sampling, cluster random sampling, systematic random sampling, two stage random sampling, probability proportional to size*, dan seterusnya. Dengan adanya keterbatasan tersebut, maka metode langsung yang dapat diterapkan pada penelitian ini berdasarkan asumsi metode penarikan sampel berupa *simple random sampling*.

Berdasarkan pengolahan data Susenas dari 37 (tiga puluh tujuh) kecamatan diperoleh bahwa 13 (tiga belas) kecamatan yang menjadi sampel tidak memiliki rumah tangga yang termasuk kedalam kategori miskin, sehingga tidak dapat dilakukan pendugaan secara langsung. Tiga belas kecamatan tersebut adalah kecamatan Cibungbulang, Ciampea, Tenjolaya, Cigombong, Cisarua, Babakan Madang, Sukamakmur, Jonggol, Cileungsi, Cibinong, Bojonggede, Parung dan Gunungsindur. Kelemahan penduga langsung adalah ketidakcukupan sampel pada data Susenas mempengaruhi proses pengolahan yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya proses pendugaan.

Berdasarkan 24 (dua puluh empat) kecamatan, diperoleh bahwa pendugaan proporsi dan variasi proporsi status kemiskinan rumah tangga seperti pada tabel 6. Pendugaan proporsi rumah tangga miskin terbesar berada di kecamatan Nanggung yaitu 45%, selanjutnya kecamatan Leuwisadeng sebagai wilayah penghasil sayuran menempati urutan terbesar kedua yaitu 26,67%, kemudian Kecamatan

Cijeruk sebagai wilayah penghasil tanaman hias menempati urutan terbesar ketiga dengan proporsi 25%.

Tabel 6. Pendugaan Proporsi dan RRMSE Tingkat Kecamatan di Kab. Bogor Tahun 2013

No	Kecamatan	p_i	RRMSE
1	Nanggung	0,45000	1,06148
2	Leuwiliang	0,12821	2,56803
3	Leuwisadeng	0,26667	1,51910
4	Pamijahan	0,05172	4,68087
5	Dramaga	0,10526	3,61276
6	Ciomas	0,03571	7,48201
7	Tamansari	0,06897	4,48611
8	Cijeruk	0,25000	2,28827
9	Caringin	0,03571	7,48148
10	Ciawi	0,16667	2,55063
11	Sukaraja	0,02273	9,37861
12	Cariu	0,10000	4,47142
13	Kelapa Nunggal	0,03333	7,74388
14	Gunungputri	0,02083	9,79673
15	Citeureup	0,07576	3,38095
16	Tajurhalang	0,06522	4,15842
17	Kemang	0,20000	2,14160
18	Rancabungur	0,12500	3,99937
19	Ciseeng	0,12500	3,99968
20	Rumpin	0,14894	2,17470
21	Cigudeg	0,25000	1,52991
22	Sukajaya	0,16667	2,36437
23	Jasinga	0,06667	4,56396
24	Tenjo	0,02703	8,59727

Sumber: Hasil pengolahan data Susenas, Tahun 2015

Ketiga kecamatan tersebut sudah semestinya menjadi prioritas sasaran program penanggulangan kemiskinan yang dirancang oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor ataupun stakeholders dalam rangka menekan laju pertumbuhan angka kemiskinan, khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Nilai penduga proporsi yang relatif besar pada kecamatan Nanggung, Leuwisadeng dan Cijeruk sangat mendesak untuk ditangani dan dilakukan upaya antisipatif mengenai penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi

kemiskinan di kecamatan tersebut. Salah satu yang dapat diidentifikasi adalah jenis pekerjaan yang terkait dengan usaha pertanian, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya.

Dari 13 (tiga belas) kecamatan tersebut bukan berarti tidak memiliki rumah tangga miskin. Dikarenakan sampel yang digunakan BPS hanya berukuran 1.126 rumah tangga, sedangkan rumah tangga yang termasuk kategori miskin hanya terdapat 77 rumah tangga. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya rumah tangga di wilayah kecamatan yang bersangkutan termasuk kategori miskin, hanya saja tidak dapat diketahui karena dalam penelitian ini hanya menggunakan data sampel yang diasumsikan mewakili populasi rumah tangga di wilayah tersebut. Dikarenakan pendugaan menggunakan sampel maka pastinya akan ada *sampling error*. Presisi penduga yang dihasilkan dapat dilihat berdasarkan nilai RRMSE. Nilai RRMSE yang kecil menunjukkan bahwa presisi hasil penduga yang dihasilkan memiliki presisi yang tinggi dalam menduga parameter yang sebenarnya. Besarnya persentase proporsi dan nilai RRMSE tersebut dikarenakan berbagai faktor, yaitu pemilihan metode pendugaan dan ukuran sampel di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil bahwa nilai RRMSE untuk kecamatan Ciomas, Caringin, Sukaraja, Kelapa Nunggal, Gunungputri, dan Tenjo memiliki nilai RRMSE yang lebih tinggi dari lima. Hal ini mengindikasikan bahwa presisi yang dihasilkan penduga secara langsung untuk enam kecamatan tersebut masih kurang baik. Penduga proporsi rumah tangga miskin yang memiliki presisi tinggi yaitu Kecamatan Nanggung, Leuwisadeng dan Cigudeg yang ditunjukkan dengan nilai RRMSE yang relatif kecil.

PENUTUP

Sasaran survei pengukuran kemiskinan saat ini masih dalam lingkup nasional berdasarkan Susenas, belum pada tatanan spesifik area lokal. Susenas hanya mampu menghasilkan pendugaan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sedangkan kebutuhan data sangat diperlukan sampai tingkat yang lebih kecil seperti tingkat kecamatan atau bahkan tingkat desa.

Hasil pengolahan data Susenas tahun 2013 berdasarkan pendugaan langsung dengan asumsi menggunakan metode *sample random sampling* menunjukkan bahwa dugaan proporsi rumah tangga miskin di Kabupaten Bogor sebesar 6,84% dan kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bogor 31,08% berasal dari jenis pekerjaan pertanian tanaman pangan. Sedangkan kemiskinan yang bersumber dari jenis pekerjaan usaha pertanian adalah 42,85%.

Pendugaan langsung terhadap proporsi status kemiskinan rumah tangga pada tingkat kecamatan di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa 24 (dua puluh empat) kecamatan dapat dilakukan pendugaan, sedangkan kecamatan lainnya belum dapat dilakukan pendugaan secara langsung. Hasil pendugaan proporsi rumah tangga miskin terbesar di kecamatan Nanggung yaitu 45%, selanjutnya kecamatan Leuwisadeng sebagai wilayah penghasil sayuran menempati urutan terbesar kedua yaitu 26,67%, kemudian Kecamatan Cijeruk sebagai wilayah penghasil tanaman hias menempati urutan terbesar ketiga dengan proporsi 25%.

Ketiga kecamatan tersebut sudah semestinya menjadi prioritas sasaran program penanggulangan kemiskinan yang dirancang oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah ataupun *stakeholders* dalam rangka menekan laju pertumbuhan proporsi kemiskinan di Kabupaten Bogor. Nilai penduga proporsi yang relatif

besar pada kecamatan Nanggung, Leuwisadeng dan Cijeruk sangat mendesak untuk ditangani dan dilakukan upaya antisipatif mengenai penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kecamatan tersebut. Salah satu faktor yang melatarbelakangi kemiskinan tersebut adalah jenis pekerjaan yang terkait dengan usaha pertanian, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya.

Hal menarik yang ditemui dalam penelitian ini adanya indikasi bahwa penduga yang dihasilkan melebihi kenyataan yang sebenarnya (*over estimate*). Namun, hal ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kebenaran indikasi tersebut. Dalam rangka mengatasi keterbatasan pendugaan pada area kecil, khususnya terhadap 16 area kecamatan yang belum dapat diduga disarankan untuk menggunakan alternatif metode lain seperti pendugaan tidak langsung (*Small Area Estimation/SAE*) untuk menghasilkan presisi yang mungkin lebih baik dari pendugaan secara langsung yang telah dibahas pada penelitian ini. Masih banyak isu-isu terkait kemiskinan yang menarik untuk dibahas pada kesempatan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adetayo, A. O. (2014). Analysis of Farm Households Poverty Status In Ogun States, Nigeria, Asian Economic and Financial Review, Vol. 4 No. 3, 2014. Ogun States: Director of Planning, Research and Statistics Local Government Service Commission.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor (BPS Kab. Bogor). (2014). Kabupaten Bogor Dalam Angka 2014, Cibinong: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor (Bappeda dan BPS Kab. Bogor).

- (2014). Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014, Cibinong: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor.
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (KPPN). (2014). Analisis Rumah Tangga, Lahan dan Usaha Pertanian di Indonesia: Sensus Pertanian 2013, Jakarta: Direktorat Pangan dan Pertanian.
- Kurnia, Anang. (2009). Prediksi Terbaik Empirik untuk Model Transformasi Logaritma di Dalam Pendugaan Area kecil dengan Penerapan pada Data Susenas. Disertasi S3, Departemen Statistika, Bogor.
- Purnomo, Heri. (2010). Teknik Penetapan Garis Kemiskinan Untuk Menghitung Jumlah Penduduk Miskin. Serang: BPS Provinsi Banten.
- Scheaffer, R.L., Mendenhall, W. & Ott, R.L. (2006). Elementary Survey Sampling. New York: Thomson Brooks/Cole Publishing.
- Suyanto & Pudjianto, Bambang (2014). Kesejahteraan Komunitas di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Provinsi Maluku, Informasi, Volume: 19, Nomor: 2, Halaman: 107-121, Mei-Agustus 2014.
- Internet:**
- Arianti, N.N., Nabiu, M. & Yuliarso, M.Z. (t.thn). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Regional di Kota Bengkulu. Juni 27, 2015. Diambil kembali dari https://library.pancabudi.ac.id/jurnal_files/1922de3b6f4fc68bed38a7c35d6cb95a9b0fa81f_5._Musriyadi_Nabiu.pdf.
- Badan Pusat Statistik, (t.thn). Istilah dalam Sensus Pertanian 2013. Maret 31, 2015. Diambil kembali dari <http://st2013.bps.go.id/dev2/index.php/kamus/index>.
- Molina, Isabel dan Rao, J.N.K. (2013). A Review of Poverty Mapping Procedures. Maret 7, 2015. Diambil kembali dari <http://www.statistics.gov.hk/wsc/IPS080-P3-S.pdf>.
- Nurdyana, H. Budiono & Fahmi, M. (2012). Pendidikan dan Kemiskinan: Studi Kasus Provinsi Maluku Utara. Juni 27, 2015. Diambil kembali dari http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/pustaka_unpad_pendidikan-_dan_kemiskinan1.pdf.
- Pemkab Bogor, (t.thn). Pertanian. Pebruari 17, 2015. Diambil kembali dari <http://bogorkab.go.id/index.php/page/detail/9/pertanian#>.
- Putri, A.D. & Setiawina, N.D. (t.thn). Pengaruh Umur, Pendidikan, Pekerjaan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Desa Bebandem. Juni 27, 2015. Diambil kembali dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=82313&val=981>
- Rakhmawati, Laely, (2014). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemiskinan: Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan. Juni 27, 2015. Diambil kembali dari <https://laelyrakhmawati.wordpress.com/2014/04/21/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kemiskinan/>.
- Ruslan, K. (2013). Dimensi Kemiskinan di Indonesia. Juni 27, 2015. Diambil kembali dari <http://povertyinindonesia.blogspot.com/2012/06/dimensi-kemiskinan-di-indonesia.html>.
- Suradi, (2015). Keadilan dalam Intervensi Sosial. April 24, 2015. Diambil kembali dari <http://puslit.ginwiz.com/ig8del/lnk000/=puslit.kemsos.go.id/artikel/265/keadilan-dalam-intervensi-sosial/>.
- Tim Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan. (t.thn). Program. April 25, 2015. Diambil kembali dari <http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas>.